

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Bidang tanah milik negara memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik dari segi lokasi, luas, kondisi fisik maupun status hukum. Banyak aset yang belum terdokumentasi dengan baik, atau memiliki dokumen yang tidak lengkap, tidak akurat, dan kesulitan dalam koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola aset yang dapat menghambat proses pemetaan.

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan membuat peta pembaruan persebaran aset dan fasilitas umum karena data bidang, lokasi dan informasi mengenai objek yang dihasilkan lengkap, mencakup keseluruhan kecamatan.

Secara umum pengertian Sistem Informasi Geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, yang dikemudian bisa digunakan untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Aplikasi ArcGIS berfokus pada data spasial yang digunakan untuk pemetaan dan visualisasi. ArcGIS memiliki fitur yang kuat dan lengkap yang membuatnya menjadi salah satu perangkat lunak GIS terbaik yang tersedia saat ini. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menganalisis data geografis dalam berbagai format.

AutoCAD adalah aplikasi desain digital otomatis yang menggunakan berbagai alat desain dua dimensi dan tiga dimensi secara tepat dan akurat. AutoCAD Map 3D adalah aplikasi rencana kerja pengembangan khusus untuk pemetaan, dan perencanaan lahan. Rencana kerja ini dapat langsung diakses ke CAD, GIS, dari berbagai sumber tanpa menyalin atau mengubah format data.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 29 tahun 2010 tentang penggolongan barang milik negara, dengan mengidentifikasi peta persebaran BMN yang telah dibuat pada daerah dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk memastikan bahwa semua aset BMN memiliki dokumen legal yang sah dan terdaftar dengan benar, yang dapat menghindari sengketa kepemilikan. Banyak aset negara yang belum memiliki sertifikat atau dokumen legal, yang menyebabkan

potensi sengketa. PP No 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara secara optimal, termasuk rencana dan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Pada penggunaan BMN berupa penambahan atau pengaturan mengenai pengelolaan barang dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam pengelolaan data pertanahan di Indonesia. BPN bertanggung jawab atas pendaftaran tanah, pemetaan kadastral dan pengelolaan informasi pertanahan, termasuk tanah, jalan, Gedung dan bangunan milik negara. Pengelolaan yang baik dan akurat oleh BPN sangat penting untuk memastikan bahwa aset bidang tanah milik negara dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, dan efisien.

Menurut laporan Kementerian keuangan di Indonesia, terdapat 1.098 bidang tanah milik negara yang tersebar di Provinsi Lampung. Dari jumlah itu, 867 bidang tanah yang sudah bersertifikat, termasuk tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya. Sebanyak 126 bidang yang belum bersertifikat dan 105 bidang yang masih dalam perencanaan penyelesaian sertifikat. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa sekitar 46% dari total tanah telah bersertifikat. Pemerintah terus melakukan upaya sertifikasi untuk mencapai target 70%-80% sertifikasi tanah BMN beberapa tahun ke depan.

Pembaruan peta aset bidang tanah milik negara merupakan elemen krusial dalam pengelolaan aset negara. Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembaruan peta bidang tanah milik negara serta mendukung pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan aset negara yang lebih baik. Upaya peningkatan kualitas peta pembaruan bidang tanah milik negara harus terus dilakukan untuk mendukung tujuan Pembangunan nasional dan pelayanan yang lebih baik.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui pertambahan aset bidang tanah milik negara di Kecamatan Teluk Betung Timur tahun 2023
2. Membuat peta informasi aset bidang tanah negara di Kecamatan Teluk Betung Timur tahun 2023

## **II. GAMBARAN UMUM LOKASI PKL**

### **2.1 Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung**

Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota merupakan salah satu cabang dari Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tanggung jawab melalui kepala kantor BPN kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Badan Pertanahan Nasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tata usaha, bidang pengawasan dan pemetaan, bidang penetapan hak dan pendaftaran, bidang penataan dan pemberdayaan, bidang pengadaan tanah dan bagian pengembangan, dan bidang pengendalian penanganan sengketa, yang digunakan untuk pengelolaan pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Jabatan tertinggi pratama dari kantor Pertanahan Nasional adalah seorang Kepala kantor, sedangkan untuk bagian tata usaha disebut dengan jabatan struktural tingkat III.a dan bagian seksi disebut dengan jabatan pengawas tingkat IV.

### **2.2 Visi, Misi dan Motto**

Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung saat ini antara lain menginformasikan kepada masyarakat mengenai ketersediaan akan tanah, pertek pertanahan, pengukuran tanah pertama kali, penetapan mengenai hak atas tanah, pendaftaran mengenai kepastian hak atas tanah, dan pemerosesan pengaduan permohonan. Dalam rangka membantu masyarakat dan terlaksananya cita-cita “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memiliki moto dalam melaksanakan praktik pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang ahli dan professional. Moto yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

Visi yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan besntandar dunia dalam melayani Masyarakat untuk mendukung tercapainya: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Membuat perencanaan regional dan keputusan penggunaan yang tepat, berkelanjutan dan secara teliti.

2. Penyelenggaraan dan menyusun penataan ruang dengan standar tingkat dunia dan perencanaan pelayanan pertanahan.

### **2.3 Tujuan Pokok dan Fungsi**

Badan Pertanahan Nasional berwenang melakukan prakarsa pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban serta tanggung jawab di daerah, merupakan alasan didirikannya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan Perpres No. 20 Tahun 2015, yaitu :

1. Pengembangan dan penetapan kebijakan dalam bidang monitoring, pengukuran, dan pemetaan
2. Penerapan penelitian dan pengembangan bagian pertanahan
3. Mengelola pengembangan SDM bidang pertanahan
4. Membuat dan memberlakukan kebijakan sektor pertanahan
5. Pelaksanaan dan perumusan di bidang hak atas penetapan tanah, pendaftaran hak milik, dan memberdayakan Masyarakat
6. Menerapkan dan mengembangkan kebijakan regulasi, administrasi, dan control kebijakan pertanahan
7. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
8. Pembuatan dan penggunaan kebijakan untuk pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah
9. Memantau penyelesaian kegiatan kegiatan dilingkungan BPN
10. Koordinasi tugas, pengarahan, dan dukungan administrasi dilaksanakan pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
11. Pelaksanaan pengolahan dan informasi lahan pertanian untuk pangan berkelanjutan.

### **2.4 Jenis Pelayanan dan Tugas Jabatan di BPN Kota Bandar Lampung**

Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Pertanahan, BPN kota bandar lampung menyediakan akses

informasi terkait pertanahan melalui loket layanan maupun secara daring. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai status tanah, proses pengajuan sertifikat, dan layanan lainnya melalui system informasi yang disediakan oleh BPN.

2. Pendaftaran Tanah, BPN kota Bandar Lampung menyediakan layanan pendaftaran tanah, baik untuk tanah baru maupun untuk tanah yang mengalami perubahan status kepemilikan.
3. Sertifikasi Tanah, merupakan salah satu layanan utama untuk Masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah melalui BPN untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Pemetaan Dan Penataan Batas, BPN melakukan pemetaan tanah serta penataan dan penetapan batas – batas tanah, baik untuk tanah milik individu, kelompok maupun instansi pemerintah. Layanan ini bertujuan untuk memastikan akurasi batas wilayah kepemilikan tanah dan menghindari sengketa batas tanah.
5. Pengelolaan dan inventarisasi Tanah Negara, BPN bertugas untuk mengelola dan menginventarisasi tanah yang menjadi asset negara. Tanah – tanah ini termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) yang pengelolaannya harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Organisasi ini dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka perlu adanya struktur organisasi yang dimana susunan tersebut terdiri dari tugas jabatan untuk mencapai suatu sasaran. Berikut adalah Tugas jabatan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung :

1. Kepala Kantor, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BPN pusat. Menyusun program kerja dan rencana strategis pertanahan, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pertanahan, menyelesaikan sengketa dan masalah pertanahan di wilayahnya
2. Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan pembinaan dan dukungan administrasi. Melaksanakan penyusunan rencana sampai pelaporan, melaksanakan urusan organisasi, jabatan, kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, mengkoordinasikan pengelolaan fasilitas reformasi dan advokasi di kantor pertanahan, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan ketatatusahaan, digitasi arsip, perlengkapan dan penyelenggaraan layanan

pengadaan. Pelaksanaan hubungan Masyarakat, pelayanan informasi, dan pengelolaan pengaduan Masyarakat. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di kantor pertanahan

3. Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggungjawab untuk mengatur, dan memastikan bahwa tugas – tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional berjalan sesuai dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi dan pengembangan serta Menyusun laporan kinerja kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi.
4. Seksi Survei Dan Pemetaan, melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukiran dan pemetaan bidang tanah, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukiran administrasi an Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan Kawasan pertanahan dan ruang pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.
5. Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran, melaksanakan pembinaan, pelaksanaan dan investarisasi, idntifikasi, pengelolaan data, dan penyajian informasi penetapan hak dan pendaftaran tanah
6. Seksi Pentaan Dan Pemberdayaan, melaksankan pembinaan, pengelolaan dan analisi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah Masyarakat.
7. Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan, melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan pengadaan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan tanah, pemanfaatan tanah serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.
8. Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sangketa, melaksanakan pembinaan, pengoodinasian, pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan di perbatasan atau wilayah tertentu, penerbitan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pananganan sangketa dan konflik, serta penanganan perlara pertanahan.

Bagan stuktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapatdilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Struktur organisasi kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung